

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kebijakan Jerman dalam menghadapi krisis migran pada tahun 2015 ditunjukkan dengan menerapkan kebijakan migrasi terbuka. Namun ternyata langkah yang diambil oleh pemerintah Jerman itu menuai pro kontra dari berbagai kalangan, baik itu dari pejabat pemerintah Jerman sendiri hingga dari warga Jerman. Memang, awalnya kebijakan tersebut dilakukan oleh Merkel karena tujuan kemanusiaan. Janji Merkel kepada para migran dimana Jerman menawarkan akan memberikan tempat tinggal sementara yang akhirnya mendorong para migran tersebut berbondong – bondong datang ke Jerman sehingga terjadi peningkatan jumlah kedatangan migran yang sulit untuk dikontrol hingga menjadikan sistem penerimaan migran Jerman masuk ke mode krisis. Jika dibandingkan dengan negara – negara Eropa lainnya, jumlah migran dan pencari suaka di Jerman lebih banyak daripada negara Eropa lainnya. Karena itulah migrasi menjadi tantangan yang cukup besar yang dihadapi oleh Jerman dan menjadi topik perdebatan utama dalam politik Jerman terutama setelah terjadinya krisis migran tahun 2015.

Pemerintah Federal Jerman merasa semakin tertekan baik dalam negeri maupun di luar negeri karena adanya dorongan untuk mengembangkan kebijakan terkait penerimaan pengungsi ke Eropa namun tetap memperhatikan sifat kemanusiaan. Karena terus menerus mendapatkan kritik hingga mulai adanya pandangan negatif atas ketidakmampuan pemerintah Jerman dalam menangani

jumlah migran yang membeludak, beberapa aspek undang – undang mengenai kebijakan migrasi Jerman akhirnya mulai diperketat.

Adanya pergantian kanselir menjadi sebuah langkah baru kebijakan migrasi yang diambil oleh Jerman. Pemerintah Jerman mulai memberlakukan kebijakan migrasi restriktif dengan cara mulai membatasi migran yang masuk dengan melakukan pengecekan lebih ketat di perbatasan tempat pintu masuk para migran tersebut serta melakukan deportasi secara besar-besaran kepada migran ilegal. Perubahan kebijakan migrasi Jerman tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain untuk mendorong dan menekan Pemerintah Jerman untuk mengubah kebijakannya.

Berbagai faktor tersebut berasal dari faktor domestik dan faktor internasional. Pada faktor domestik yang pertama yaitu faktor birokrasi, yaitu keputusan dari *Ministry of the Interior and Community* (BMI) sebagai birokrasi yang ikut mempengaruhi perubahan kebijakan dengan dibuatnya rancangan undang-undang yang dapat mengurangi semakin banyak migran yang masuk ke Jerman dengan memperketat perbatasan. Faktor domestik yang kedua yaitu adanya opini publik Jerman yang mulai merasakan kecemasan dan kekhawatiran akan dampak yang dapat ditimbulkan dari kebijakan migrasi terbuka yang akhirnya mendorong Pemerintah Jerman untuk melakukan perubahan kebijakan. Faktor domestik yang ketiga adalah media Jerman yang memberikan sentimen negatif dengan kedatangan para migran dengan menyebarkan berita negatif terkait dampak yang disebabkan oleh para migran tersebut.

Faktor domestik yang keempat yakni kelompok kepentingan, adanya kelompok populis sayap kanan *Patriotic Europeans Against the Islamization of the West* atau PEGIDA yang menolak keberadaan migran di Jerman dimana mereka memandang bahwa Jerman berada dalam ancaman dengan datangnya para migran. PEGIDA melakukan aksi demonstrasi serta kampanye anti-islam, anti-migran dan seringkali menggunakan ujaran kebencian terhadap para migran saat melakukan aksi demonstrasi. Faktor domestik yang kelima atau yang terakhir yaitu partai politik, dimana terdapat partai politik yang berhaluan sayap kanan yang menuduh pemerintah Jerman gagal dalam mengatasi peningkatan jumlah migran. Partai politik tersebut yakni partai *Alternative for Germany* (AfD) dimana mereka menggunakan retorika anti - imigran untuk mendapatkan dukungan suara kepada warga Jerman yang juga menolak mengenai diterimanya para migran tersebut.

Lalu terdapat juga faktor internasional yang turut mempengaruhi perubahan kebijakan migrasi Jerman. Faktor internasional yang pertama yakni faktor global dimana adanya nilai multikulturalisme yang kurang dapat diterima oleh masyarakat Jerman yang menganggap bahwa identitas nasional merupakan sesuatu hal yang penting dimana jika mereka mengabaikannya akan menyebabkan kehancuran dari rakyat Jerman serta keruntuhan negara. Lalu faktor internasional yang kedua adalah faktor regional yaitu prosedur, pengakuan suaka serta ketentuan Undang – Undang Suaka yang dirancang oleh Pemerintah Jerman sesuai dengan arahan UE dan penerapan peraturan UE yang relevan.

Kemudian faktor internasional yang ketiga adalah kerjasama bilateral, dimana adanya kerja sama antara Uni Eropa (UE) dengan Turki terkait penanganan

arus migran di Eropa turut mempengaruhi kebijakan migrasi Jerman. Lalu faktor yang terakhir yaitu aktor *non-state*, yakni adanya kelompok terorisme turut serta dalam mempengaruhi perubahan kebijakan migrasi Jerman. Dimana yang pada awalnya Jerman melakukan migrasi terbuka, namun karena adanya isu terorisme sebagai ancaman keamanan nasional Jerman akhirnya membuat Pemerintah Jerman mengubah kebijakan migrasinya menjadi lebih restriktif dan melakukan *border controls*.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat saran penelitian yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya di masa mendatang adalah bagaimana perubahan kebijakan migrasi di Jerman di bawah pemerintahan Olaf Scholz mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Pemilihan topik pembahasan penelitian tersebut menarik dikarenakan topik penelitian tersebut nantinya dapat menjelaskan lebih dalam mengenai dampak dari perubahan kebijakan migrasi Jerman di berbagai aspek seperti pada dampak perubahan kebijakan terhadap integrasi migran dan pada aspek kemanusiaan seperti perlakuan Pemerintah Jerman terhadap migran, pengungsi, dan pencari suaka dalam konteks hukum internasional dan norma etika global.